



KPK 'OBOK-OBOK' DPRD DKI JAKARTA

Terkait Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang, Bawa 7 Koper Barang Bukti

Sebulan lalu, kejutan datang dari Jawa Timur (Jatim) saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah gedung DPRD-nya. Kini, tahun 2023 dibuka dengan ironi serupa. Komisi anti-rasuah 'mengobok-obok' kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023). Upaya geledah paksa ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019. Perkara korupsi pengadaan tanah ini sudah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan. Dari penggeledahan di gedung para wakil rakyat itu, petugas KPK membawa sedikitnya 7 koper diduga barang bukti. Salah satu sasaran adalah ruang kerja anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra M Taufik yang juga telah menjalani pemeriksaan, 8 September 2022 lalu.

(Baca Hal 11)

Government (Hal.2)
Lagi-lagi Luhut
Bilang Tak Mau
Lihat OTT

**TINDAK PIDANA
KORUPSI
BERDASARKAN
JENIS PERKARA
TAHUN 2022**

Pengadaan barang/jasa **30**

Penyuapan **56**

Penyalahgunaan Anggaran **2**

TPPU **3**

TOTAL 91

KASUS

3.93 2022

3.88 2021

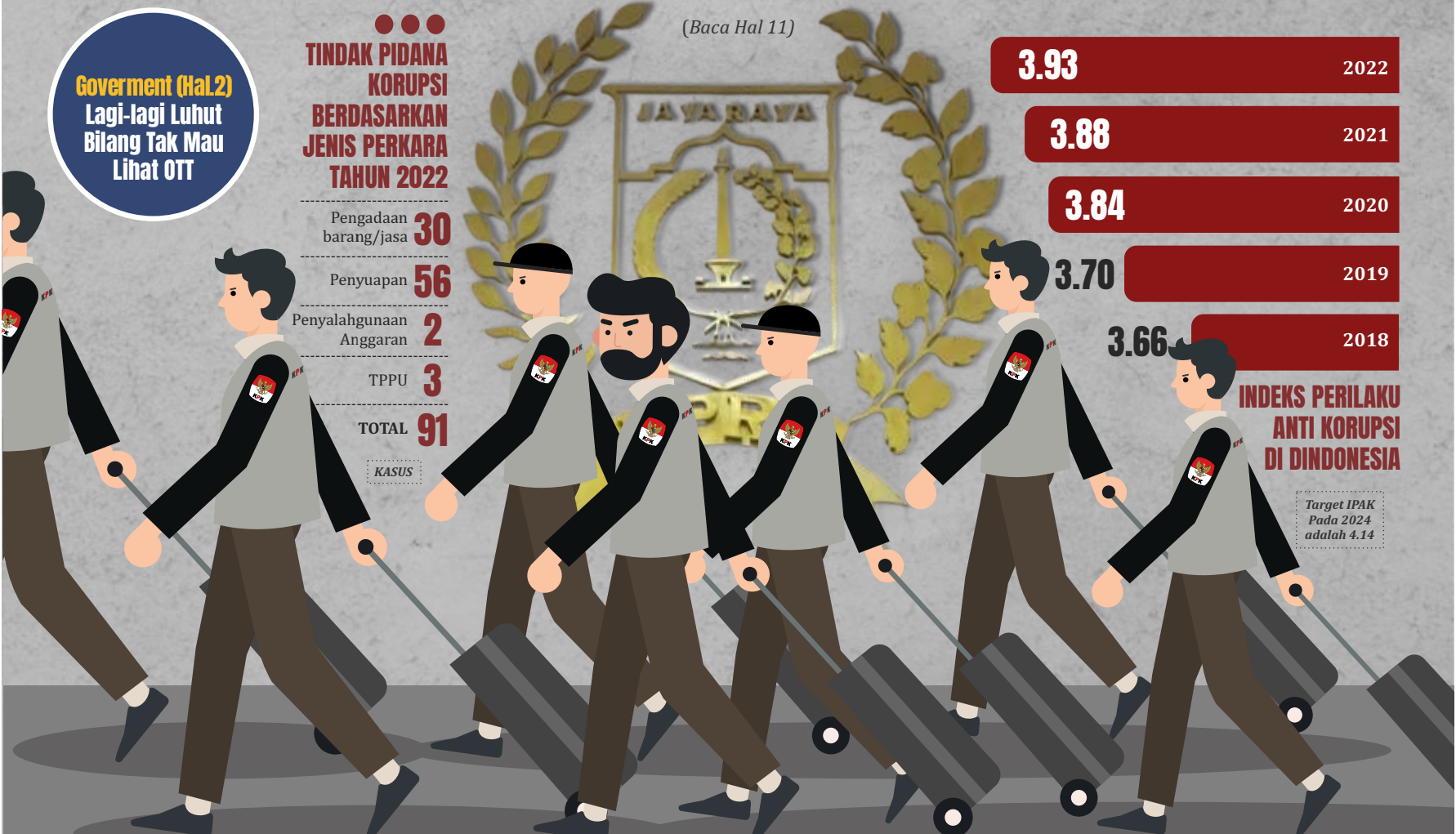
3.84 2020

3.70 2019

3.66 2018

**INDEKS PERILAKU
ANTI KORUPSI
DI INDONESIA**

Target IPAK
Pada 2024
adalah 4.14



Lagi-lagi Luhut Bilang Tak Mau Lihat OTT

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) terkait korupsi. Kali ini ia mengatakan tidak mau melihat ada OTT ke depan karena pemerintah sudah melakukan digitalisasi.

"Jadi dengan itu kita lakukan digitalisasi, kita akan mengurangi korupsi, dan kita tidak mau melihat ada OTT ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik," kata Luhut saat memberikan paparan di Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 secara virtual, Selasa (17/1/2023).

Menurut Luhut, OTT pasti tidak akan terjadi apabila ekosistem melalui digitalisasi baik. Jika hal itu terjadi, Luhut yakin tingkat korupsi berkurang. "Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT. Bukan karena itu. Kami tidak ingin negara yang begitu hebat di puja puji orang masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus," tegasnya. "Ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengan digitalisasi tadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut dikritik karena meminta KPK untuk tidak terusteran mengandalkan OTT.

"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu, kan, ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang digelar Stranas PK, 20 Desember 2022.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, masalah korupsi memang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Bahkan Mahfud menyebut setiap hari selalu terjadi praktik korupsi di Indonesia.

"Korupsi juga terus menjadi hambatan bagi kita, banyak kalau kita melihat korupsi di tempat kita ini hampir setiap saat terjadi," kata Mahfud dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di SICC Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023). "Kalau tidak ada di Jakarta ada di sana (daerah), di sana hampir tiap hari," lanjut dia.

Mahfud memaparkan, Presiden Jokowi sudah pernah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait peliknya menangani kasus korupsi di Indonesia. "Tadi Presiden waktu berbicara sedikit dengan saya, 'coba Pak Menko, saya pernah bicara dengan Presiden AS, tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dengan angka yang besar pejabat-pejabat tingginya' Ketua DPR masuk, Wakil Ketua DPR Masuk, menteri masuk, gubernur masuk, bupati masuk, DPR masuk. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia," ucap dia.

Selain itu, Mahfud mengatakan indeks persepsi korupsi Indonesia juga tak kunjung membaik. Naikinya hanya setahun satu dan kadang turun naik. "Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan mari kita lakukan jaminan keamanan, memberi jaminan

keamanan saudara kita mungkin perlu juga memberi apresiasi kepada Polri yang pada awal tahun 2022 itu memberi kontribusi terbesar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah karena keamanan," jelas dia.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan rata-rata kepercayaan publik mencapai 76 persen kepada pemerintah. Sedangkan Polri mencapai 87 persen. "Sehingga 76-nya banyak di bawahnya sektor-sektor lain. Tapi bulan Juli turun drastis ketika terjadi peristiwa Sambo. Agustus-September naik lagi tapi belum mencapai titik optimal yang pernah dicapai, ini harus dijaga ke depan," tutup dia.

Warga Lebih Permisif

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi 2022 untuk mengukur perilaku antikorupsi di masyarakat lewat indikator yang disebut Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat.

Pada tahun 2022 BPS mencatat adanya penurunan dari segi Indeks Persepsi. Hal ini menunjukkan menurunnya pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku antikorupsi. Nilai Indeks Persepsi di tahun 2022 adalah sebesar 3,80 menurun 0,03 poin dibandingkan tahun 2021 (3,83).

"Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sikap masyarakat cenderung lebih permisif terhadap perilaku korupsi dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 dan 2020 hasil indeks persepsi mengalami penurunan lagi menjadi 3,80 (2019) dan 3,68 (2020). Indeks persepsi mencapai titik tertinggi pada tahun 2018, yaitu sebesar 3,86 dan pencapaian titik kedua tertinggi pada tahun 2021 sebesar 3,83," ungkap BPS dalam keterangan resminya.

Pada tahun 2022, kesadaran antikorupsi di lingkup keluarga dan publik mengalami penurunan, sedangkan di lingkup komunitas meningkat. Dalam lingkup keluarga misalnya, hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2022 menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap sikap seseorang yang menerima uang tambahan dari pasangan (suami/istri), di luar gaji/penghasilan yang biasa diterima, tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang tidak wajar mengalami penurunan 0,3 persen dibandingkan tahun 2021.

Kemudian sebagian besar masyarakat menganggap sikap seseorang Pegawai Negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga/pribadi merupakan hal yang tidak wajar (78,56 persen). Hanya 21,44 persen masyarakat yang menganggap wajar.



Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

"Bila dilihat perkembangannya, terjadi penurunan sebesar 3,19 persen pada persepsi masyarakat yang menganggap tidak wajar pada tahun 2022 dibanding 2021 (81,75 persen). Penurunan persentase jawaban tidak wajar ini menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap sikap Pegawai Negeri tersebut," ujar BPS.

Masih dalam lingkup keluarga, pada tahun 2022, sebanyak 81,91 persen masyarakat menganggap tidak wajar terhadap sikap seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga tanpa seizin pemiliknya (contoh: sepatu, baju, tas, dll). Angka tersebut sedikit mengalami penurunan sebesar 3,73 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,64 persen.

Kemudian dalam lingkup publik, hasil SPAK 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap sikap demi menjaga hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai, baik pegawai negeri/swasta/TNI/Polri, merupakan hal yang tidak wajar dengan persentase sebesar 70,62 persen. Nilai ini menurun dibanding tahun 2021 (73,36 persen). "Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai antikorupsi pada masyarakat yaitu nepotisme," ungkap BPS. (dfn/igp)

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung komitmen KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Politisi NasDem itu menilai OTT merupakan salah satu proses tercepat ringkus koruptor.

Sebab, KPK sudah mengantongi bukti kuat menindak para terduga koruptor dan tidak ada alasan menutupi penangkapan koruptor. "Lagi pula kalau memang ini dramatis, apa salahnya publik melihat langsung ada maling ditangkap? Kalau bisa ditangkan saat kejadian kenapa tidak. Sebab proses pembuktian jadi berlangsung lebih cepat dan mudah karena adanya barang bukti," ungkap Sahroni dalam keterangan tertulisnya.

Sahroni tetap menekankan KPK memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan. Hal itu menurutnya, perlu dilakukan untuk meminimalisasi potensi korupsi. "Memang KPK harus tetap

utamakan sistem pengawasan dan pencegahan," tukasnya.

Namun demikian, tambah Sahroni, sistem pencegahan tentunya harus sesuai perkembangan zaman. KPK harus terus mengkaji dan mengevaluasi secara berkala agar sistem pencegahan berjalan dengan baik. "Tutup rapat-rapat segala celah korupsi. Dengan begitu saya yakin kita dapat lebih efektif dan efisien," tutup Legislator Dapil DKI Jakarta III itu. (wid,rls,ant/dya)

BEBERAPA OTT KPK DI TAHUN 2022

1. Pada 14 Desember, KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah. Dari operasi itu, KPK menyita uang Rp 1 miliar dalam pecahan mata uang asing.
2. Pada 22 September, KPK menangkap tangan hakim yustisial, PNS pada kepaniteraan dan pegawai Mahkamah Agung (MA). Dari perkara itu, KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.
3. Pada 20 Agustus KPK menciduk Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dan sejumlah bawahannya. Karomani diduga mematok tarif Rp 100 hingga Rp 350 juta untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang ia luluskan dalam Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) 2022.
4. Pada 11 Agustus, KPK menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Ia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ia diduga mematok tarif Rp 60 hingga 350 juta.
5. Pada 6 Juni, KPK bergerak menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terkait dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton.
6. Pada 27 April, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin terkait kasus dugaan suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Ade Yasin dan sejumlah bawahannya menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk memanipulasi temuan pada LKPD Kabupaten Bogor. Dalam perkara itu, pihak Ade Yasin diduga menyuap auditor BPK Jawa Barat sebanyak Rp 1,9 miliar.
7. Pada 19 Januari 2022, KPK menangkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat terkait dugaan suap terkait jual-beli perkara. Dari OTT Hakim Itong ini, KPK mengamankan uang Rp 140 juta.

DPR-Presiden Sepakat Bila Jabatan Kades 9 Tahun



Ribuan kepala desa se-Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2023) menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. (Foto-ist)

JAKARTA - Meski belum diputuskan secara resmi tapi DPR RI mauapaun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal persetujuan terkait tuntutan erpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai langkah ini akan semakin meringankan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi anggaran pemilihan kades. "Sesuai mandat Undang-Undang (UU) Desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) dilakukan secara serentak di kabupaten/kota tersebut, sehingga beban penganggaran pemilihan kepala desa melalui APBD tentunya cukup besar," kata Said, di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Maka dari itu, dirinya mengapresiasi aspirasi para kepala desa yang menghendaki perubahan masa jabatan agar jarak kontestasi pilkades bisa lebih lama. Adapun kepala desa menyampaikan aspirasi ke DPR untuk merevisi secara terbatas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya terkait masa jabatan kepala desa.

Jarak pilkades yang lebih lama juga tak akan menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades. Sebagaimana diketahui, proses pilkades dalam banyak kasus menimbulkan ketegangan bahkan fragmentasi sosial yang terkadang memuncak secara eksekutif dalam waktu yang lama dan membutuhkan pemulihan.

Selain mengurangi anggaran pemilihan, menurut Said, perubahan masa jabatan kepala desa juga akan memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanye dengan kecukupan waktu tanpa terganggu segera memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi berikutnya di pilkades karena singkatnya masa jabatan.

Dengan demikian untuk mengakselerasikan pemerintahan desa, maka masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun nantinya harus mengikuti masa jabatan kepala desa yang berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Akselerasi ini diperlukan agar kontrol BPD bisa berjalan efektif dan paralel secara waktu dengan periode masa jabatan kepala desa, dimana dapat dipilih kembali untuk dua periode masa jabatan," katanya lagi.

Kendati demikian, ia menegaskan perubahan masa jabatan kepala desa yang lebih lama memerlukan kontrol yang lebih efektif tidak saja dari kelengkapan struktural, baik melalui BPD sebagai mitra kerja kepala desa, tetapi juga pemerintah daerah sebagai organisasi pembina pemerintah desa. Kontrol yang aktif dari segenap kekuatan sipil di desa seperti organisasi masyarakat kepemudaan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa pun turut diperlukan.

Dari istana kabar baik diungkapkan politikus Budiman Sudjatmiko. "Saya dipanggil presiden terkait demonstrasi Kades. Setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun," kata Budiman, Selasa (17/1/2023).

Salah satu alasan perpanjangan karena pemilihan kades membuat polarisasi di tingkat desa cukup berkepanjangan sehingga dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal.

"Saya juga menyampaikan ke Bapak Presiden soal perlunya pengaturan sumber daya manusia desa. Saat ini banyak anggaran desa untuk operasional fisik. Wajar-wajar saja, tapi ada tantangan SDM dibenahi," kata Budiman lagi.

Oleh sebab itu, Budiman

memberikan masukan perlunya industrialisasi pertanian. "Karena itu, butuh manusia industrialisasi desa. Pertanian industri, manajemen pertanian yang hasil pertaniannya tidak habis untuk operasionalnya, tidak habis untuk diri sendiri, maka butuh manusia berkualitas," ungkap Budiman.

Gagasan ini diusulkan agar masuk revisi UU Desa, yaitu dengan menambahkan Pasal 27C. Presiden Jokowi memberikan opsi bila tidak bisa masuk UU maka bisa dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP). "Bapak Presiden menyambut baik," ucap Budiman.

Masuk Prolegnas 2023

Ratusan Kepala Desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) memenuhi area depan gerbang Gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.

Kepala Desa Bondoyudo, Edi Hariyanto, yang saat itu didapat sebagai koordinator aksi damai Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang, yang berhasil dihubungi kantor berita Radarbangsa.co.id biro Lumajang, Selasa malam (17/1/2023) menyampaikan, bahwa tuntutan kepala desa sudah mendapatkan respon dari DPR.

"Alhamdulillah, di tahun 2023 ini sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," kata koordinator aksi damai, Edi Hariyanto.

Dijelaskannya, pihak aksi saat itu ditemui Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Gerindra dan juga Fraksi PKB. "Intinya dari aksi damai kawan kepala desa se-Indonesia sudah mendapat respon positif dari DPR. Mereka berjanji akan memasukkan tuntutan kita dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023 ini," papar Edi Hariyanto.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan masa jabatan kepala desa (kades) yang 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa.

Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades.

"Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga

masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena yang nggak produktif nggak cuma kepala desanya tapi juga warganya," ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat audiensi dengan kepala desa se-Jombang di Gedung Makarti Jakarta, Senin (16/1/2023).

Menurut Gus Halim, fakta konflik polarisasi pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Akibatnya Pembangunan akan tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terganggu. "Artinya apa yg dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jd Ketua DPRD. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu," ujarnya.

Sehingga lanjut Gus Halim, dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, para pakar menyebutkan ketegangan konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah. Hal ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pilkades.

Selain itu, jika kinerja Kades buruk, masyarakat juga tidak perlu khawatir. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk. (wid,rls,ant/dya)

ATURAN MENGENAI MASA JABATAN KADES SAAT INI

PASAL 39 UU DESA :

- Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Pasal 47 PP 43/2014:

- Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan;
- Kepala desa yang sudah memegang jabatan selama 6 tahun tersebut dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- Ketentuan periodisasi masa jabatan tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia;
- Ketentuan periodisasi masa jabatan juga termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa;
- Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 periode masa jabatan.

Rentetan Gempa Bumi Terjadi, Wajarkah?

SURABAYA - Belakangan ini, rentetan gempa bumi terus mengguncang berbagai daerah di Indonesia. Bahkan kekuatannya cukup signifikan dari yang bersifat merusak hingga yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan. Meski demikian, rentetan gempa tersebut dianggap masih wajar.

Berdasarkan beberapa rentetan gempa yang sempat terjadi diantaranya di Cianjur dengan kekuatan M5,6 yang berpotensi mengakibatkan kerusakan. Kemudian ada juga gempa di Garut berkekuatan M6,1, dan Sukabumi berkekuatan M5,8.

Lalu, membuka 2023, gempa merusak terjadi di Jayapura dengan kekuatan M5,4. Gempa signifikan lainnya mengguncang Tanimbar, Maluku dengan kekuatan M7,5, gempa juga terjadi di Bengkulu dengan kekuatan 5,3, dan di Aceh Singkil berkekuatan M6,2. Kemudian terjadi juga di Bali, dan yang terakhir pada Selasa (17/1/2023) gempa terjadi di kabupaten Malang.

Beruntung, dari sejumlah gempa kuat yang sudah terjadi dari laut tak ada yang sampai disusul dengan bencana tsunami. Begitu juga sejumlah gempa kuat tak sampai merusak. Tapi, apakah arti dari rangkaian gempa kuat tersebut dan adakah yang harus dicemaskan dari tren gempa yang terjadi itu?

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan bahwa rentetan gempa kuat yang terjadi belakangan ini menyatakan bahwa rentetan gempa yang terjadi masih dalam batas kewajaran. "Tidak ada catatan khusus. Fenomena kegempaan semacam ini satu hal wajar dan normal karena gempa memang memiliki tipe yang bermacam-macam, adapun kejadian tipe-tipenya bergantung lokasi dan kondisi geologi dan tektoniknya," katanya dikutip dari tempo.co, Selasa (17/1/2023).

Daryono mengatakan bahwa kewajaran tren gempa yang terjadi belakangan ini berdasarkan catatan masa lalu juga ada dimana pola aktivitas gempa semacam ini juga terjadi. "Meningkatnya aktivitas gempa akhir-akhir ini kami menilainya masih tergolong wajar. Ini karena kami mengacu pada data gempa jangka panjang. Data statistik gempa jangka panjang menunjukkan beberapa tahun lalu juga pernah seperti akhir-akhir ini," katanya.

Meski demikian, kejadian gempa belangan ini di luar prediksi dan tidak dapat diprediksi. "Hanya saja gempa-gempa tersebut sebagian besar terjadi pada sumber-sumber yang sudah dikenali, meski ada juga gempa terjadi pada sumber gempa yang belum terpetakan," tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan

bahwa tidak mudah untuk menduga kapan dan di mana serta berapa magnitudo suatu gempa. Seperti gempa Maluku, Papua, Cianjur, dan lainnya juga sama sekali tidak tahu kapan terjadinya meski sumbernya diketahui bahwa di kawasan tersebut dapat terjadi gempa meski tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi.

Dia juga menandakan bahwa selama ini BMKG telah melakukan kajian prekursor gempa. Namun demikian, beberapa metode prediksi gempa seperti geomagnet, gas radon, dan lain-lain belum memberikan hasil memuaskan. Ada yang konsisten mampu "memprediksi" tetapi beberapa kejadian gempa signifikan juga tak mampu diprediksi sehingga hal ini masih menjadi kajian atau riset.

Ketika disinggung kemungkinan rentetan gempa yang terjadi saling berkaitan dan saling memicu, Daryono mengatakan bahwa antar gempa bisa saja terjadi karena dalam ilmu gempa ada konsep atau teori picuan statik. Tetapi, syaratnya harus dekat sumber gempa yang bakal terpicu, dan tentunya akumulasi energi tegangan kulit bumi-nya harus sudah maksimum.

Sementara itu, dalam sehari, Selasa (17/1/2023) ada dua gempa dengan kekuatan cukup signifikan. Yang pertama adalah gempa di Malang berkekuatan magnitudo M4,8. Sebelumnya, parameter gempa sempat diinformasikan sebesar magnitudo M5,1. Namun, Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengkonfirmasi bahwa gempa yang terjadi pukul 11.36.12 WIB. Dan berlokasi di laut pada jarak 111 Km arah BaratDaya Kab. Malang, ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,8.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi intraslab kedalaman menengah, akibat deformasi pada batuan dalam Lempeng Samudera Indo-Australia," ujar Daryono.

Dia Melanjutkan, dampak gempabumi tersebut dirasakan di daerah Karangates, Sumbermanjing Wetan dengan skala intensitas III-IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Kemudian di wilayah Kepanjen, Lumajang, Malang dengan skala intensitas II-III MMI. "Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," lanjutnya.



Kerusakan akibat gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu.

Dari pantauannya, hingga pukul 12.00 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan atau aftershock. Selain itu, Daryono juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap tenang, dan senantiasa mengakses laman resmi BMKG <http://www.bmkg.go.id> serta channel telegram https://t.me/InaTEWS_BMKG agar dapat mengetahui informasi yang akurat.

"Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa," tandasnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Nur Fuad Fauzi, mengatakan bahwa wilayah setempat aman, dan tidak ada korban jiwa. "Sampai dengan saat ini, pantauan teman-teman di lapangan, masih aman terkendali dan semoga tetap aman terkendali," ujar Kalaksa BPBD Kab. Malang, Nur Fuad Fauzi, saat dikonfirmasi langsung melalui sambungan seluler, Selasa (17/1/2023).

Satu lagi gempa terjadi di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (17/1/2023) pukul 22.21WIB. BMKG mengumumkan gempa berkekuatan sebesar Magnitudo 4,7. Petugas BMKG pun memperingatkan agar warga tetap waspada pada gempa susulan.

Seperti dikatakan BMKG, Gempa berkekuatan 4,7 Magnitudo yang terjadi di darat 27 KM Timur Laut Rupeng itu dirasakan beberapa saat. Pusat gempa sendiri berada di darat tepatnya di kedalaman 30 KM.

"Pusat gempa berada di darat 27 km TimurLaut Ruteng, Wilayah Dirasakan (Skala MMI), IV Ruteng, III

Nagekeo, II - III Labuan Bajo, II Congkar, II Reo, III Borong, II Bajawa," tulis keterangan BMKG, dikutip dari okezone.com, Selasa (17/1/2023).

Hingga saat ini, belum diketahui dampak serta korban jiwa yang diakibatkan oleh guncangan gempa tersebut. Namun, BMKG memperingatkan kepada masyarakat waspada gempa susulan. "Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," terangnya. (lut/dya)

“

Tidak ada catatan khusus. Fenomena kegempaan semacam ini satu hal wajar dan normal karena gempa memang memiliki tipe yang bermacam-macam, adapun kejadian tipe-tipenya bergantung lokasi dan kondisi geologi dan tektoniknya”

DARYONO

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG



Target Selesai Tahun 2024, Kementerian PUPR Lelang Proyek IKN Rp 23,7 Triliun

JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembangunan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai pada 2024. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang paket proyek pembangunan IKN dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun.

"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun untuk sekitar 30 paket. Paket proyek tersebut untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang dikerjakan oleh APBN melalui Kementerian PUPR," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI Jakarta dikutip dari tempo.co, Selasa (17/1/2023).

Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp 5,1 triliun.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.

Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada 2024.

Sebelumnya, Basuki menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai pada 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

Pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non-APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wapres.

Sementara itu, pendanaan non-APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.

Di satu sisi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkap data sementara aparatur sipil negara (ASN) di 35 kementerian dan lembaga yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu tertuang

dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Surat bertanggal 19 Desember 2022 itu merespons Berita Acara Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hunian ASN dan Hankam (pertahanan dan keamanan) pada tanggal 9 November 2022 yang ditandatangani Wakil Kepala Otorita IKN. Isinya, meminta Kementerian PAN-RB segera menyampaikan data komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan struktur keluarga dengan jumlah 16.990 personil ASN dan Hankam.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa dari jumlah 16.990 personil ASN dan Hankam dimaksud, yang dikoordinasikan oleh Pokja ASN IKN (Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas) sebanyak 11.274, selebihnya sebanyak 5.716 di bawah koordinasi Pokja Hankam yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan," tertulis dalam surat yang ditandatangani Abdullah Azwar Anas, Selasa (17/1/2023).

Di dalam surat juga dilampirkan rincian alokasi jumlah ASN pada 35 kementerian dan lembaga yang dipindah ke IKN tahun 2024. "Selanjutnya, untuk menentukan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang dipindah, termasuk struktur keluarga yang ikut pindah pemetaannya dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian dan lembaga," katanya.

Perpindahan ibu kota negara ini juga mendapat tanggapan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DKI Jakarta. Mereka meminta pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta untuk segera memutuskan rencana konkret tentang bagaimana masa depan kota Jakarta terkait pindahnya ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan.

"Kami minta pemerintah pusat dan DKI Jakarta untuk memikirkan dan merumuskan Jakarta mau dibawa ke mana," kata Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Saat menjelaskan rekomendasi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI DKI Jakarta, Iwantono mengatakan ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan akan memiliki dampak yang sangat serius bagi perhotelan dan restoran di Jakarta.



(Ilustrasi) Proyek IKN

Ia mengatakan pemerintahan pusat, termasuk kementerian, kantor pusat perusahaan dan lainnya akan pindah ke ibu kota baru. "Nasib hotel dan restoran tentu sangat tergantung pada nasib Jakarta," katanya.

Saat ini, kata Iwantono, belum diketahui dengan pasti apakah Jakarta akan menjadi kota keuangan, perdagangan, industri atau pariwisata. "Masih kabur, Jakarta ingin menjadi apa," katanya.

Jika peruntukan kota Jakarta diketahui, katanya, tentu pelaku usaha perhotelan dan restoran akan dapat segera pula menyesuaikan usahanya.

Iwantono berharap PHRI bisa dilibatkan dalam pembahasan mengenai masa depan Jakarta. Ia mengatakan, asosiasi yang lain tentu juga akan berkenan jika diundang untuk merumuskan nasib Jakarta.

Pada kesempatan itu, Iwantono juga mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta mulai meningkat. "Menurut data BPS jumlah wisman yang berkunjung ke Jakarta pada bulan Oktober 2022 naik sebesar 1,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan ini seiring dengan berbagai upaya pemerintah dalam pemulihan sektor pariwisata diantaranya meningkatkan kualitas pariwisata dan peningkatan fasilitas dan atraksi di destinasi wisata. Tetapi kenaikan ini masih belum dapat menyamai jumlah kunjungan wisman sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pada Oktober 2022, wisatawan yang berasal dari wilayah ASEAN tetap mendominasi kunjungan ke Jakarta mencapai 39.591 wisman. Berdasarkan kebangsaan, kunjungan wisatawan dari Malaysia tercatat paling tinggi mencapai 15.125 wisman atau 13,43 persen dari seluruh kunjungan. (lut/dya)

35 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SERTA UNIT KERJANYA YANG MENJADI PRIORITAS PERTAMA UNTUK PINDAH KE IKN YAITU:

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian PPN/ Bappenas
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8. Kementerian Kesehatan
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Perdagangan
12. Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
13. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
14. Kementerian Dalam Negeri
15. Kementerian Luar Negeri
16. Kementerian Pertahanan
17. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Kementerian Komunikasi dan Informatika
19. Kementerian PAN RB
20. Kejaksaan Agung
21. Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat
22. Mahkamah Agung
23. Komisi Yudisial
24. Badan Pemeriksa Keuangan
25. Kantor Staf Presiden
26. Dewan Pertimbangan Presiden
27. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
28. Badan Intelijen Negara
29. Badan Siber dan Sandi Negara
30. Komisi Pemberantasan Korupsi
31. Badan Meteorologi, Klamatologi, dan Geofisika
32. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
33. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
34. Badan Pangan Nasional
35. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

A photograph of Michael Bolton performing on stage. He is wearing a dark suit jacket over a dark shirt, with a blue pocket square. He is holding a microphone in his right hand and looking towards the camera with a slight smile. The background is a stage set with blue and red lighting and circular patterns.

ALBUM

MICHAEL BOLTON

Terjual Jutaan Kopi

Foto - Foto : Berbagai Sumber

BINTANG pop Michael Bolton mengadakan konser pertama untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun terakhir di Seoul, Korea Selatan pada 14 dan 15 Januari 2023.

Menurut laporan yang disiarkan Yonhap, Minggu (15/1/2023), Michael Bolton akhirnya kembali menyapa para penggemar di Korea setelah terakhir kali pada 2014. Musisi itu pun tampil dengan membawakan lagu-lagu hitsnya.

Penyanyi sekaligus master pencipta lagu itu menggelar konsernya di Gocheok Sky Dome pada hari Sabtu dan Minggu. Konser itu pun diberi tajuk "Encore, Michael Bolton Live in Seoul."

Konser ini seharusnya berlangsung pada November tahun lalu. Akan tetapi konser tersebut pun diundur karena terjadi insiden yang mematikan di lingkungan Itaewon Seoul pada Oktober 2022.

Selama konser, Michael Bolton juga sempat mengajak para penggemar untuk mengheningkan cipta untuk para korban tragedi Itaewon.

Dalam penampilannya, penyanyi terkemuka itu menampilkan 11 lagu selama sekitar satu jam, termasuk hitsnya, "When a Man Loves a Woman" dan "How Am I Should To Live Without You."

Michael Bolton merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang lahir di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 26 Februari 1953.

Michael Bolton dikenal sebagai penyanyi dengan genre musik slow rock. Namun, jarang yang mengetahui bahwa pada pertengahan dekade 1980-an, Michael Bolton pernah membawakan lagu-lagu bergenre hard rock dan heavy metal.

Bolton merupakan salah satu musisi yang sukses dan berprestasi karena albumnya telah terjual hingga jutaan kopi di berbagai negara. Ia juga pernah masuk dalam nominasi American Music Awards (AMA) dan Grammy Awards.

Pada dekade 1980-an, Michael Bolton mencapai puncak popularitas. Lagu-lagu Michael Bolton yang mendunia di antaranya Over The Rainbow, To Love Somebody, dan When a Man Loves a Woman.

Sepanjang kariernya, hingga tulisan ini dibuat, Michael Bolton telah merilis delapan album sepuluh besar dan memiliki sembilan lagu.

Pada tahun 1975, Michael Bolton merilis album yang namanya berasal dari keluarganya yaitu Bolotin. Salah satu hit besar karya pertamanya adalah karya klasik Otis Redding (Sittin' On) the Dock of the Bay. Pada tahun 1991, Bolton merilis album Time, Love & Tenderness.

Michael Bolton juga kerap berkolaborasi dengan artis lain dalam menulis lagu. Single top 40 terakhir Bolton adalah Go The Distance yang ditampilkan dalam film animasi Disney Hercules dan menduduki nomor satu di tangga lagu Amerika Serikat.

Pada tahun 2006, Michael Bolton

dan Nicollette Sheridan, tunangannya saat itu, berduet membawakan lagu The Second Time Around untuk album Bolton Swings Sinatra.

Selain bernyanyi dan menulis lagu, Bolton juga pernah berperan dalam film layar lebar dan televisi seperti Wally Sparks (1997), Snow Dogs (2002), Onion (2008), Two and a Half (2012), Bintang Pop: Never Stop Never Stopping (2016) dan lainnya.

Lagunya yang berjudul New York, New York juga dimainkan dalam episode serial TV Challenge Anneka. Keuntungan yang didapatkan dari album tersebut disumbangkan ke rumah sakit anak di seluruh Inggris.

Dalam setiap konsernya, Michael Bolton selalu berusaha untuk memuaskan para penontonnya. Tidak seperti penyanyi lainnya yang berjarak dengan penonton ketika tampil, konser Bolton justru hanya memiliki satu persyaratan unik untuk para penontonnya.

Pada saat konser Bolton di Indonesia, Bolton memperbolehkan penontonnya untuk mengambil foto sebanyak-banyaknya dan tidak ada pihak keamanan yang membatasi kedekatan Bolton dengan

penggemarnya.

Penonton yang berada di posisi belakang boleh lari menuju ke tengah untuk menyapa, foto, bahkan memegang Michael Bolton yang sedang bernyanyi. Di konser ini, Michael Bolton juga sempat berduet dengan Anggun C. Sasmi membawakan lagu How Am I Supposed To Live Without You. Tidak hanya itu, penyanyi Amanda Bron juga berduet dengan Bolton dengan menyanyikan lagu Make You Feel My Love dan The Prayer.

Pada tahun 1975, Michael Bolton

menikah dengan Maureen McGuire dan memiliki tiga orang anak, Isa Bolton, Holly Bolton, dan Taryn Bolton. Namun, 15 tahun kemudian keduanya memutuskan untuk bercerai.

Pada tahun 1993, Bolton mendirikan Yayasan The Michael Bolton Foundation yang kemudian berganti nama menjadi The Michael Bolton Charities. Yayasan itu dibentuk untuk membantu perempuan dan anak-anak yang terkena dampak dari kemiskinan dan pelecehan seksual (berbagai sumber)



Michael Bolton

3 MANFAAT AKUPUNTUR UNTUK KESEHATAN DAN RISIKONYA

KONDISI nyeri atau stroke yang tidak kunjung membaik dipercaya bisa diatasi dengan penggunaan perawatan tradisional, seperti akupunktur. Pengobatan ini merupakan salah satu pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok, dengan menggunakan jarum-jarum tipis sebagai alat pengobatan.

Sebaiknya ketahui lebih banyak mengenai manfaat akupunktur untuk kesehatan. Pastikan juga kamu tidak melakukan pengobatan ini di sembarang tempat. Sebab, meskipun jarang terjadi, akupunktur dapat menyebabkan risiko pada kesehatan.

MANFAAT AKUPUNTUR UNTUK KESEHATAN

Akupunktur adalah pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan jarum tipis yang dimasukkan ke dalam kulit untuk merangsang titik tertentu pada tubuh. Biasanya, pengobatan ini digunakan untuk meringankan gejala dari suatu penyakit yang dialami seseorang.

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai cara kerja pengobatan ini, seperti:

- Akupunktur dapat merangsang pelepasan hormon endorfin yang merupakan bahan kimia penghilang rasa sakit dalam tubuh.
- Akupunktur dapat memengaruhi sistem saraf otonom dan penempatan jarum pun dapat memengaruhi

pernapasan, tekanan darah, dan detak jantung.

Tentunya manfaat yang dirasakan pun akan berbeda pada setiap individu. Namun, ada beberapa manfaat akupunktur yang bisa kamu rasakan ketika menjalani tindakan ini, seperti:

1. Membantu redakan beberapa penyakit

Akupunktur bisa menjadi salah satu pengobatan non obat yang membantu kamu meredakan beberapa keluhan kesehatan akibat penyakit tertentu.

Nyeri Punggung. Pengobatan ini mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fungsi punggung yang lebih baik setelah perawatan.

Migrain. Melakukan akupunktur secara rutin mampu menurunkan risiko munculnya gejala migrain. Selain itu, pengobatan ini juga bisa dilakukan untuk mencegah kambuhnya penyakit migrain.

Osteoarthritis lutut. Pengobatan akupunktur mampu meningkatkan fungsi lutut dalam jangka pendek pada pengidap osteoarthritis lutut.

2. Bisa digunakan Bersama obat lain

Akupunktur merupakan pengobatan tradisional yang bisa dilakukan bersama dengan pengobatan utama yang wajib kamu lakukan secara medis.

3. Pengobatan yang fleksibel

Pengobatan tradisional ini cukup fleksibel untuk dilakukan sekaligus dalam mengatasi keluhan kesehatan. Saat melakukan akupunktur, jarum hanya akan diletakkan pada titik-titik yang mengalami masalah. Sehingga memungkinkan untuk diletakkan pada beberapa titik sekaligus.

Akupunktur hanya dilakukan sebagai perawatan atau pengobatan tradisional saja. Jika berbagai penyakit yang kamu alami tidak membaik setelah melakukan akupunktur, sebaiknya lakukan pemeriksaan kesehatan dirumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan secara medis.

WASPADA RISIKO SAAT AKUPUNTUR

Jika kamu melakukan pengobatan tradisional ini dengan praktisi akupunktur yang tepat, pengobatan

ini terbilang aman untuk dilakukan. Namun, tidak ada salahnya untuk membicarakan riwayat kesehatan dengan praktisi sebelum kamu melakukan pengobatan ini.

Meskipun jarang terjadi, ada beberapa risiko yang bisa dialami ketika kamu melakukan akupunktur, seperti:

Perdarahan, lebam, hingga bengkak pada bagian yang mendapatkan tusukan jarum. Kondisi jarum atau kulit yang tidak steril bisa memicu infeksi.

Jarum dapat patah dan menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit yang mendapatkan tusukan.

Pengobatan ini seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit atau nyeri yang menusuk. Segera tanyakan pada praktisi akupunktur jika kamu mengalami nyeri atau sakit yang sangat menusuk selama pengobatan. Biasanya, rasa sakit yang terjadi akibat posisi jarum yang tidak sesuai atau tidak tepat (Sumber: halodoc)



66 Persen Warga Dunia Mengakses Internet

PERSATUAN Telekomunikasi Internasional atau International Telecommunication Union (ITU) mencatat, jumlah pengguna internet di dunia mencapai 5,3 miliar orang pada 2022.

Dilansir dari dataindonesia.id, Senin (16/1/2023) angka tersebut mengindikasikan 66 persen dari populasi dunia telah menggunakan internet.

Jumlah pengguna internet dunia mengalami kenaikan 8,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, ITU mencatat jumlah pengguna internet sebesar 4,9 miliar orang.

Melihat trennya, pengguna internet di dunia cenderung selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pertumbuhan pengguna internet tertinggi mencapai 13,51 persen pada 2019.

Menurut laporan Global Web Index, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat global untuk mengakses internet selama 403 menit atau 6 jam 43 menit pada 2022.

Durasi tersebut turun 13 menit dibandingkan pada tahun lalu yang selama 416 menit atau 6 jam 56 menit. Penurunan ini merupakan yang pertama kali terjadi setelah Covid-19 mewabah di dunia.

Namun, durasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan masa pra pandemi pada 2019 yang selama 401 menit atau 6 jam 41 menit.

GWI juga mencatat, intensitas aktivitas berjejaring bisnis secara online mengalami perubahan paling signifikan lantaran turun 23 persen dibanding akhir 2018.

Posisinya diikuti aktivitas riset bisnis online yang turun 16 persen. Adapun, GWI mendapatkan data ini dari survei terhadap 2.595.435 pengguna internet di dunia.

Responden survei berusia 16-64

tahun yang berasal dari 50 negara dan tersebar di wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, hingga Asia.

Indonesia

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pandemi COVID-19 membuat masyarakat Indonesia harus menggunakan internet untuk membantu aktivitas sehari-hari.

Kenyataan ini diperkuat hasil Survei Internet Indonesia Tahun 2021-2022 (Q1) dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa ada penambahan pengguna internet dan perubahan perilaku berinternet di Tanah Air akibat pandemi.

Berdasarkan survei terbaru itu, pengguna internet di Indonesia berjumlah 210.026.769 orang dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 272.682.600 jiwa.

Penetrasi internet terhadap jumlah penduduk mencapai 77,02 persen. Angka ini terus naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, penetrasi internet di Indonesia berada di angka 64,80 persen.

Periode 2019-2021, jumlahnya naik menjadi 73,70 persen.

Dari 77,02 persen tersebut, Pulau Jawa menyumbang penetrasi internet terbesar, hampir separuh yaitu 43,92 persen. Kontribusi kedua berasal dari Sumatera yaitu 16,63 persen, kemudian diikuti Sulawesi (5,53 persen), Kalimantan (4,88 persen) dan Nusa Tenggara (2,71 persen).

Pulau Bali menyumbang 1,17 persen terhadap total penetrasi Internet di Indonesia, sementara Papua 1,38 persen dan terakhir, Maluku 0,81 persen.

APJII mengadakan survei ini kepada 7.568 responden di 34 provinsi. Responden terbanyak

berusia 19-34 tahun (3.012 orang) dan 35-54 tahun (3.009 orang).

Survei ini juga melibatkan responden usia 13-18 tahun (905 orang) dan 55 tahun ke atas (641 orang). Tahun ini, responden survei APJII lebih banyak perempuan (4.099) dibandingkan laki-laki (3.468 orang).

Perubahan perilaku selama pandemi

APJII mencatat ada perubahan perilaku menggunakan internet akibat pandemi COVID-19. Jika dilihat dari usia, 76,63 persen responden usia 13-18 tahun menjawab mereka lebih sering menggunakan internet sejak pandemi.

Kelompok usia 19-34 persen yang mengalami peningkatan frekuensi penggunaan internet berjumlah 53,99 persen, sementara usia 35-54 tahun berjumlah 47,91 persen.

Peningkatan penggunaan internet yang dialami kelompok usia tersebut sejalan dengan fenomena belajar dan

bekerja dari jarak jauh saat pandemi. Sementara itu, pada kelompok usia 55 tahun ke atas, sebanyak 31,93 persen responden yang mengalami kenaikan penggunaan internet.

APJII menemukan alasan masyarakat menggunakan internet adalah untuk mengakses pesan instan dan media sosial (98,02 persen), sekolah atau kerja dari rumah (90,21 persen) dan mencari informasi atau berita (92,21 persen).

Mereka juga menggunakan internet untuk mengakses layanan publik (84,9 persen), transportasi online (76,47 persen), layanan keuangan (72,32 persen), transaksi online (79 persen), email (80,74 persen) dan konten hiburan (77,25 persen).

Survei ini juga menemukan masih ada masyarakat yang tidak menggunakan internet, paling banyak merasa harga kuota mahal (45,16 persen) dan tidak memiliki gawai (44,8 persen) - (berbagai sumber)



EMPAT TREN

GAYA HIDUP

PRODUKTIF

DI 2023



DI AWAL tahun, banyak orang yang sudah merencanakan resolusi untuk dijalankan selama setahun ke depan. Salah satu yang biasanya masuk ke dalam daftar resolusi adalah gaya hidup yang aktif dan produktif.

Apakah kegiatan-kegiatan yang akan populer di tahun 2023 untuk menunjang gaya hidup aktif dan produktif itu? Lalu, bagaimana caranya agar Anda dapat menjalani kegiatan tersebut dengan baik? Berikut rangkumannya seperti tertulis dalam keterangan pers Huawei, Senin.

Hiking dan berlari

Di tahun 2023, diprediksi akan semakin banyak orang tertarik melakukan hiking, di mana kegiatannya bisa dikategorikan olahraga karena mendorong gerak aktif tubuh lewat jalan kaki.

Selain hiking, berlari juga diprediksi akan menjadi kegiatan

favorit. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan atau acara lari marathon pun akan semakin banyak diselenggarakan.

Untuk menemani Anda dalam melakukan kegiatan tersebut, Huawei mengkombinasikan panduan kesehatan berbasis digital dengan teknologi canggih lewat Huawei WATCH Fit 2 yang membawa ragam fitur kesehatan terdepan, serta HUAWEI WATCH GT3 dengan desain mewah yang memiliki berbagai workout mode dan pemantauan SpO2.

Belajar dan bekerja dari mana saja

Sejak pandemi, belajar dan bekerja dari mana saja terus menjadi tren yang digandrungi masyarakat. Apalagi, teknologi yang ada saat ini sangat mendukung kegiatan tersebut.

Huawei MatePad SE yang canggih dan multifungsi, serta dilengkapi layar yang lebar ini sangat cocok untuk

menemani Anda belajar maupun bekerja. Perangkat ini memiliki fitur multi-user yang memungkinkan beberapa pengguna menggunakan satu tablet bergantian, namun tetap memiliki privasi sendiri.

Selain itu, ada juga HUAWEI MatePad Pro, tablet dengan pengalaman PRO layaknya PC siap memberikan pengalaman luar biasa bagi pengguna.

Memotret

Tren bepergian akan kembali populer di tahun 2023 seiring pelonggaran pembatasan sosial di banyak tempat. Semakin banyak orang bepergian ke tempat baru, tren memotret pun akan ikut meningkat.

HUAWEI P50 Pro menjawab kebutuhan tersebut melalui rancangan mutakhirnya sebagai smartphone dengan kualitas kamera high-end photography lewat pengalaman True

to Life Photography serta optik HUAWEI XD yang revolusioner.

Smartphone tersebut juga mempunyai desain yang mewah dan tipis, sehingga menjadikannya stylish untuk berbagai skenario penggunaan terutama menjadi partner traveling dan fotografi.

Tren work smart

Bukan hanya tren bekerja virtual maupun hybrid, tren work smart juga semakin populer. Work smart merupakan trik bekerja secara efektif untuk hasil yang maksimal, sehingga hasil yang didapat lebih baik dan memuaskan.

Tren ini tentu tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Untuk itu, Huawei menghadirkan MateBook D16 i5 dan MateBook D15 i7 dengan layar besar, teknologi canggih, serta rangkaian fitur impresif. Selain itu, ada juga Huawei MateBook 14s i5 dan MateBook D14 i5 (Ant)



HUAWEI WATCH FIT 2



Hiking dan Berlari



HUAWEI MatePad SE



Belajar & bekerja dari mana saja



HUAWEI P50 PRO



Memotret



MateBook D16 i5



Tren Work Smart

KPK 'Obok-obok'.... (dari hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pengeledahan terhadap Kantor DPRD Jakarta, pada Selasa, 17 Januari 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya upaya geledah paksa dari tim penyidik tersebut.

"Benar adanya pengeledahan dari tim penyidik berkaitan dengan korupsi" ujar Ali melalui keterangan tertulis, pada Selasa (17/1/2023).

Ali mengatakan upaya geledah paksa Kantor DPRD DKI Jakarta tersebut guna mendapatkan bukti dalam perkara tersebut. Namun, dia belum mengatakan apa saja yang didapat dari hasil geledah paksa terhadap."Perkembangan selanjutnya akan kami informasikan segera," ujar Ali.

Perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang melibatkan proyek Badan Usaha Milik Daerah Perumda Sarana Jaya 2018-2019. Saat ini, KPK menyebut sudah ada sejumlah tersangka yang telah ditetapkan. Namun, nama-nama tersangka tersebut belum juga diumumkan oleh KPK.

KPK juga telah memeriksa Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra M Taufik M. Taufik dan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada 8 September 2022 lalu.

Di lapangan, petugas KPK telah membawa sebanyak tujuh koper barang bukti yang diduga berisi berkas dan barang lainnya hasil pengeledahan dari Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023). Petugas KPK keluar dari gedung sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu Gedung DPRD lama dan memasukkan koper-koper tersebut pada enam mobil jenis mini bus yang bersiap di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Anehnya, saat pengeledahan berlangsung, seluruh lampu di lobi gedung dipadamkan.

Pantauan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, lampu lobi gedung DPRD DKI dimatikan saat proses pengeledahan berlangsung. Padahal, di hari biasanya, lampu di lobi gedung DPRD DKI tak pernah dipadamkan. Dari luar gedung, tampak lampu di lantai ruangan setiap fraksi DPRD DKI masih menyala. Semua akses pintu masuk menuju gedung dikunci. Personel Pamdal tampak bersiaga di sejumlah titik. Sebanyak enam mobil KPK terparkir di halaman gedung. Awak media tertahan dan tak diperkenankan masuk ke area gedung selama pengeledahan.

Setelah memasukkan tujuh koper berwarna hitam dan merah tersebut ke dalam mobil, petugas KPK langsung pergi meninggalkan gedung institusi legislatif tersebut. Selama proses pengeledahan oleh KPK, akses masuk ke Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD DKI Jakarta, dan awak media tidak diberikan akses untuk masuk meliput kegiatan tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan

mendukung proses penyelidikan KPK yang tengah menggeledah DPRD DKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. "Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Pras melalui keterangan tertulis, Selasa (17/1/2023).

Pras mengaku belum mengetahui pasti proses penegakan hukum yang dilakukan KPK itu terkait kasus apa. Ia mengklaim seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ujarnya.

Duduk Perkaranya

Berdasarkan catatan, kasus Pulogebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang. Namun, lembaga antirasuah ini belum mengumumkannya ke publik. Hal itu berdasarkan kebijakan pimpinan KPK era Firlil Bahuri Cs yang baru akan menyampaikan konstruksi kasus berikut identitas tersangka bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Pengadaan tanah dalam kasus ini merupakan proyek Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019. Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta, dan notaris.

Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik pun sudah dilakukan pemeriksaan pada Kamis, 8 September 2022 lalu. Saat itu, dia didalami perihal pembahasan anggaran untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang. Taufik mengaku penyidik KPK turut menanyakan hubungan dirinya

dengan Yoory Corneles Pinontoan. "Ya, saya misalnya 'kenal pak Yorry?' kenal. Kan pernah pertemuan dalam pembahasan di APBD anggaran, itu aja kok," ucap Taufik kepada wartawan sesuai pemeriksaan tersebut.

Terpisah, mantan penasihat KPK 2017-2019 Budi Santoso membenarkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih ada dan masih akan terus ada jika didasari dari faktor mindset yang keliru. "Kasus korupsi masih ada dan masih akan terus ada apabila mindset kita semua masih menganggap bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi seolah hanya menjadi beban dan tanggung-jawab KPK saja," ujar Budi.

Menurut dia, bahkan aparat penegak hukum (APH) lain juga mengandalkan KPK sebagai "tulang punggung" satu-satunya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. "Terakhir dengan tertangkapnya dua hakim agung MA misalnya, seolah APH lain sama sekali merasa tidak punya beban untuk berkontribusi membantu tupoksi KPK, mindset ini tentu saja salah besar," lanjut dia.

Selain itu, kasus korupsi juga tidak akan habis terlebih dengan melihat kondisi internal KPK seperti sekarang ini. Artinya, akan sangat naif jika upaya pemberantasan tipikor hanya dibebankan kepada KPK saja.

Budi mengatakan, hadirnya KPK dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinilai masih kurang. Ia menambahkan, ada juga keengganan pemerintah dan DPR untuk menuntaskan janji reformasi dalam hal pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Noptisme (KKN). "Artinya, dengan segala upaya untuk terus merecoki kewenangan-kewenangan KPK sebagaimana terjadi pada pengundangan revisi UU KPK pada 2019 yang lalu," ujar Budi. Mengenai keengganan pemerintah dan DPR yang disebutnya, Budi menganggap, pemerintah dan DPR tidak serius dalam memperkuat kelembagaan KPK. "Mereka tidak serius dalam memperkuat kelembagaan KPK, yang terjadi adalah sebaliknya, contoh revisi UU KPK 2019 yang isi/substansinya banyak yang memperlemah kewenangan KPK,"

ucap Budi.

Kinerja KPK tahun lalu pun cukup mentereng. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK terus berkomitmen untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Efek jera itu tidak hanya memenjarakan badan kepada pelaku, namun juga mengoptimalkan asset recovery melalui pidana tambahan uang pengganti secara optimal. Oleh karena itu, KPK juga terus berupaya dalam pengembangan perkara pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

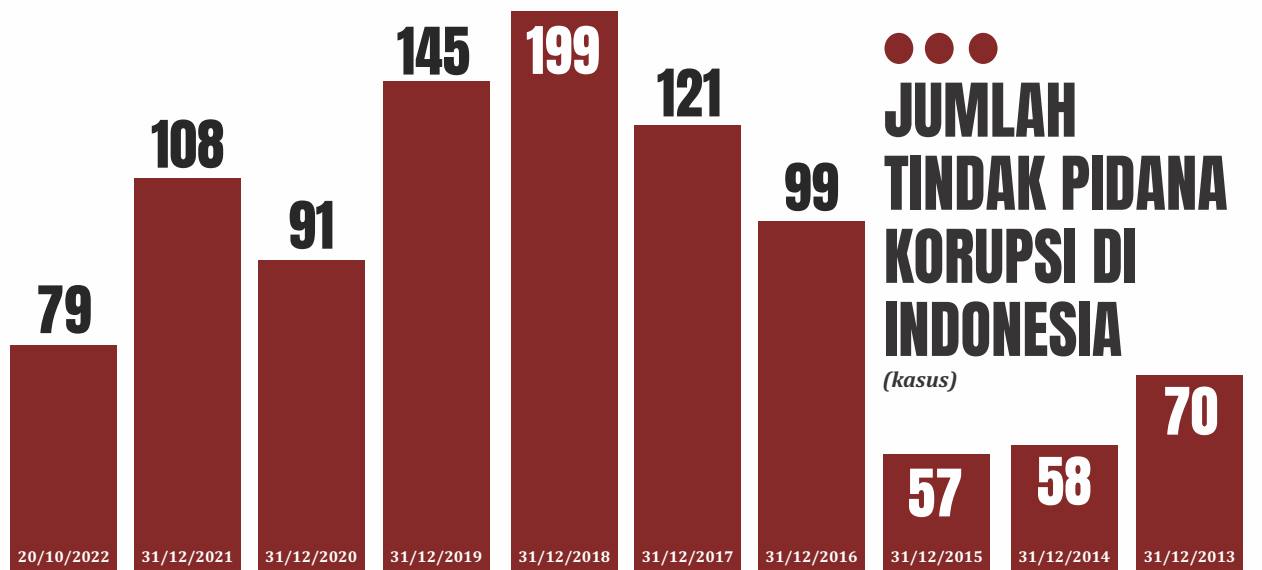
Tahun 2022, KPK telah menetapkan 149 orang tersangka atau meningkat 38 tersangka dari tahun sebelumnya. Kemudian, selama 2022, KPK juga telah melakukan 113 penyelidikan, 120 penyidikan, atau 12 surat perintah penyidikan (sprindik) lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Kemudian, 121 penuntutan atau meningkat 33 perkara dari tahun sebelumnya, 121 perkara inkracht (berkekuatan hukum tetap) atau meningkat 34 perkara dari tahun sebelumnya, dan mengeksekusi putusan 100 perkara atau meningkat 11 perkara dari tahun. Selanjutnya, KPK juga mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) selama tahun 2022.

Selama tahun 2022, KPK menyelamatkan keuangan negara/daerah sebesar Rp63,9 triliun dengan jumlah aset sebanyak 83.052 unit.

KPK juga telah menerima 4.623 laporan dugaan korupsi dari masyarakat melalui email, KPK whistle blowing system (KWS), langsung/demonstrasi, media sosial, SMS, surat/faks, maupun telepon. Rinciannya, laporan terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 585 pengaduan, Provinsi Jawa Barat 429 pengaduan, Provinsi Sumatera Utara 379 pengaduan, Jawa Timur 357 pengaduan, dan Jawa Tengah 237 pengaduan.

Dari total 4.623 pelaporan tersebut, sebanyak 363 tindakan memenuhi kriteria laporan dugaan tindak pidana korupsi sehingga diarsipkan dan 4.260 dilanjutkan pada proses verifikasi. (wid,ist, ant,kum/dya)



TETIBA PRESIDEN VIETNAM MUNDUR, BUNTUT KESALAHAN BAWAHANNYA



Presiden Vietnam
Nguyen Xuan Phuc

HANOI - Secara tiba-tiba Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri pada Selasa (17/1/2023). Keputusan ini diambil usai Partai Komunis menyalahkan Nguyen atas pelanggaran dan kesalahan yang dibuat pejabat di bawahnya, ketika dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri.

Nguyen menjabat sebagai Perdana Menteri dari 2016 sampai 2021. Usai menjalankan tugas kepala pemerintahan Nguyen terpilih sebagai Presiden dengan masa waktu jabatan kurang dari dua tahun.

Di Vietnam jabatan Presiden hanya memegang tugas seremonial. Namun, ia adalah salah satu dari empat pilar kekuasaan di Vietnam yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Partai, Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Parlemen.

Kabar mengenai pengunduran diri Nguyen disampaikan Komite Sentral, yang merupakan badan paling berkuasa di Partai Komunis pada Selasa (17/1/2023). Tidak dijelaskan dengan jelas kesalahan apa yang dibuat bawahan Nguyen. Meski demikian diduga kesalahan terkait dugaan korupsi.

"Kami sepenuhnya sangat memperhatikan tanggung jawab dia di hadapan partai dan rakyat, dia mengajukan permohonan pengunduran diri dari tugas, pekerjaannya dan pensiun," ucap pernyataan Komite Sentral seperti dikutip dari Reuters.

Langkah Phuc ini disebut sangat tidak biasa di pemerintahan Vietnam. Di mana perubahan politik biasanya diatur dengan hati-hati dengan penekanan pada stabilitas.

Kantor Kepresidenan Vietnam belum berkomentar tentang pengunduran diri Nguyen. Calon penggantinya pun masih samar. Sebelum mundur selama sepekan terakhir kabar pengunduran

diri Nguyen kancang berembus. Sebab, pada awal Januari dua deputi perdana menteri yang menjabat saat dia bertugas dipecat.

Pemecatan berlangsung ketika Partai Komunis memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Dengan pengunduran diri Nguyen maka karier politiknya untuk menduduki posisi Sekjen Partai Komunis tertutup. Sekjen Partai adalah jabatan paling bergengsi di Negeri Paman Ho.

Kendati akhirnya mundur, semasa menjadi PM Nguyen dikenal sebagai PM pro-bisnis. Ia berjasa mempercepat pertumbuhan ekonomi Vietnam.

Di bawah pemerintahannya pula Vietnam menjalin perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan dua kekuatan besar di Pasifik Jepang dan Australia.

Ekonomi Melesat

Stabilitas perekonomian Vietnam sendiri saat ini sangat moncer. Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspor dan penjualan ritel yang kuat. Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997.

Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen. Lajunya juga lebih kencang dari tahun lalu yang hanya 2,58 persen akibat lockdown yang turut menekan perekonomian mereka, serta berdampak pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.

Tahun ini, PDB Vietnam melonjak tinggi di tengah kekhawatiran turunnya permintaan ekspor imbas resesi global. Vietnam termasuk produsen utama barang-barang seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik untuk merek-merek internasional ternama. "Kinerja

menembus 7,2 persen." Vietnam akan diuntungkan oleh kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekspor yang sangat kuat," tulis Bank Dunia.

Merujuk data statistik Vietnam, ekspor Vietnam mencapai USD342,19 miliar pada 2022, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat USD336,31 miliar. Dalam laporan Bank Dunia tersebut, Vietnam juga menjadi satu dari tiga negara di ASEAN yang mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 7 persen pada 2022. Selain Vietnam, ada Filipina dan Malaysia yang diperkirakan mampu mencatatkan pertumbuhan 7,2 persen dan 7,8 persen.

Sementara di kawasan Asia, India tetap yang plaign juara soal proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023, dimana negara tersebut berpotensi bisa mencapai 6,6 persen, sama dengan Vietnam proyeksi pertumbuhan ini mengalami koreksi dari sebelumnya yang diperkirakan bisa mencapai 7,1 persen.

Sementara itu, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh 4,8 persen pada 2023. Proyeksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada Juni 2022 yang berada di kisaran 5,3 persen. Di antara negara Asia, pertumbuhan masih kalah jauh dibandingkan India dan Vietnam. Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Filipina, Mongolia, Bangladesh, dan Kamboja yang diproyeksi mampu tumbuh di atas 5 persen. Di antara negara utama Asia, Indonesia menempati peringkat tujuh di Asia. (Reuters, CNA, wid/dya)

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2023 NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA BERDASARKAN LAPORAN TERBARU WORLD BANK

Negara	Proyeksi 2023	Perubahan Proyeksi
Vietnam	6.3 %	-0.2 %
Filipina	5.4 %	-0.2 %
Kamboja	5.2 %	-0.6 %
Indonesia	4.8 %	-0.5 %
Malaysia	4.0 %	-0.5 %
Thailand	3.6 %	-0.7 %
Timor Leste	3.0 %	0.2 %
Myanmar	3.0 %	-

*Myanmar dikecualikan dari perhitungan proyeksi karena tingginya ketidakpastian